

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sumber devisa negara yang besar dan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan. Wisatawan mulai beralih ke produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya, dan atraksi unik, setelah banyak produk wisata konvensional yang ditinggalkan. Kebahagiaan wisatawan tidak lagi tergantung pada keindahan alam dan ketersediaan fasilitas wisata, tetapi juga pada kebebasan dan intensitas interaksi dengan masyarakat dan lingkungan mereka. Wisata pedesaan, dengan produknya yang unik, khas, dan ramah lingkungan, dapat menjadi solusi baru untuk pertumbuhan pariwisata di seluruh dunia. Menyikapi pergeseran minat wisatawan tersebut, bermunculan pilihan wisata baru di Indonesia berupa desa wisata di berbagai provinsi di Indonesia. (Susyanti & Latianingsih, 2015).

Menurut Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), desa wisata sekarang menjadi tren pariwisata global. Desa wisata menawarkan pengalaman liburan yang lebih baru dan unik kepada pengunjung. Program pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia mencakup pengelolaan desa wisata. Program ini sesuai dengan RPJMN 2020–2024 dan bertujuan untuk mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai tanggapan atas pentingnya pengelolaan desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf menargetkan pada tahun 2024 terdapat 244 desa wisata yang disertifikasi sebagai desa wisata mandiri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mendukung pengembangan desa wisata. (RI, 2021).

Dibutuhkan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata sejak tahap perintisan untuk mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata percontohan memiliki potensi, sarana, dan prasarana yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap industri pariwisata yang sangat rendah, yang

mengakibatkan kunjungan wisatawan rendah atau sama sekali tidak ada Ani Wijayanti & Yitno Purwoko, (2022).

Berkembangnya desa wisata di Ponorogo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup sosial. Saat ini, sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo sedang mengalami kemajuan. Saat desa wisata berkembang, bisnis seperti restoran, pedagang kaki lima, dan akomodasi selalu muncul. Setelah pemerintah daerah berfokus pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo, industri pariwisata di sekitar desa wisata juga meningkat. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa wisata, terutama para pelaku usaha yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. (Kusumastuti, 2018).

Di Kecamatan Badegan ada sebuah Desa yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan yaitu Desa Karang. Keberadaan Desa ini memiliki potensi yang mendukung karena mempunyai destinasi wisata Gunung Badut yang menjadi salah satu sektor wisata Desa. Hal ini memainkan peran penting dalam menyediakan akses, fasilitas, dan dukungan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan wisata. Gunung Badut ini memiliki keindahan alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, menawarkan pemandangan alam, serta kemungkinan kegiatan ekowisata lainnya.

Gunung Badut merupakan kawasan hutan lindung yang belum tersentuh oleh pariwisata. Namun, potensi wisata alamnya yang indah mulai dilirik oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Karang bersama dengan masyarakat setempat mulai merencanakan pengembangan Gunung Badut sebagai destinasi wisata. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan setapak, gazebo, dan toilet. Berbagai kegiatan promosi dan edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata Gunung Badut. Program pengabdian kepada masyarakat dapat membantu pengembangan desa wisata, seperti pelatihan pariwisata, peningkatan kesadaran pariwisata, bantuan pengelolaan desa wisata, pelatihan promosi pariwisata, dan bantuan kelembagaan, seperti perbaikan administrasi dan kearsipan, dan bantuan kepada pengurus dan anggota. Pembangunan destinasi wisata Gunung Badut Desa Karang kecamatan Badegan ini merupakan visi misi dari Kepala Desa Karang

Bapak Pujiyanto yang telah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karang. Diawali dari musyawarah perdusun sampai ke tingkat desa lalu daftar usulan disusun dalam bentuk RPJMDes (6 tahun) dan RKPDes (1 tahun). Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalam menyusun RKP tersebut membutuhkan waktu dalam setahun yang sesuai dengan perencanaan. Sumber anggaran pendapatan dan belanja Desa mengawasi pendapatan desa (APBDes). Kepala Desa bertanggung jawab mengatur urusan keuangan Desa, hal ini diatur dengan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Dengan peraturan Desa Karang No 08 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah tahun 2020 -2025 menimbang “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karang Tahun 2020-2025”.

Kebijakan Pemerintah Desa Karang dalam Pembangunan Destinasi Wisata Gunung Badut adalah proses perubahan dan perkembangan yang terjadi secara berkelanjutan dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di destinasi wisata Gunung Badut, Desa Karang, Kecamatan Badegan. Aspek-aspek yang termasuk dalam Implementasi kebijakan Pemerintah Desa Karang dalam pembangunan destinasi wisata Gunung Badut Karang contohnya Aspek Sosial yaitu Perubahan pola interaksi dan hubungan sosial antar masyarakat dengan Meningkatnya interaksi antar masyarakat lokal dengan wisatawan. Dengan adanya koordinasi jaringan kerja diantara Pemerintah lokal untuk menjamin kualitas manajemen pariwisata local (Pramusita & Sarinastiti, 2018).

Destinasi wisata Gunung Badut Desa Karang memiliki potensi wisata yang bagus, seperti pemandangan alam yang unik. Hal ini dapat membantu mengungkap potensi tersebut dan mengembangkan strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan. Kini Pemerintah Desa terus mengalokasikan dana pembangunan dari tahun pertahun yang dimulai sejak tahun 2019. Pembangunan destinasi wisata di Gunung Badut Desa Karang dapat berdampak positif pada perekonomian lokal, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan

menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata.

Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Karang bersama dengan masyarakat setempat mulai merencanakan mengembangkan Gunung Badut sebagai destinasi wisata. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan setapak, gazebo, dan toilet. Berbagai kegiatan promosi dan edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata Gunung Badut. Mulai tahun 2020 Pemerintah Desa Karang mengalokasikan 30 juta untuk pembangunan gazebo serta 20 juta pengeboran sumur, di tahun 2021 mengalokasikan 30 juta untuk pembuatan toren air di puncak Gunung Badut serta pipa-pipa air dari atas untuk mengaliri kebutuhan air yang ada di bawah dan ditahun 2022 Pemerintah Desa Karang Kembali mengalokasikan 40 juta untuk pembuatan kolam pemancingan.

Pembangunan destinasi wisata gunung badut ini Bukan hanya dari APBDes saja tetapi pembangunan Destinasi wisata gunung badut juga mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti dukungan dari Kementrian Desa berupa uang senilai 500 juta di tahun 2023 Untuk itu pembangunan destinasi wisata gunung badut di tahun 2023 mulai dari pembangunan gazebo besar maupun kecil dari atas sampai bawah gunung tersebut. Pemerintah juga mendapatkan bantuan dari bantuan keuangan khusus desa (BKPD) dari Kabupaten Ponorogo bantuan ini berupa uang yang diberikan kepada desa sebesar 100 juta yang digunakan untuk sarana prasarana yang ada di gunung badut. Ini menjadi hal penting untuk menunjang wisata gunung badut ini sehingga pembangunan di 2024 mencapai masih 60%. Harapannya dari pemerintah Desa sendiri target di tahun 2026 pembangunan wisata gunung badut ini bisa selesai. Karena pembangunan ini tinggal pelengkap saja seperti spot foto, kolam renang untuk anak-anak, wahana anak-anak dan penambahan lampu-lampu yang unik sehingga wisata ini semakin lengkap bukan hanya di pagi, siang, sore saja tetapi wisata gunung badut ini semakin lengkap apabila adanya wisata malam juga.

Pemerintah Desa terus menambah fasilitas pendukung dari tahun per tahun mulai dari gazebo kecil maupun besar, tempat pemancingan, jalan menuju puncak, tempat ngopi dan lampu lampu unik yang ada di destinasi wisata gunung badut. Pemerintah Desa setiap satu bulan sekali juga mengadakan evaluasi

guna meningkatkan koordinasi kepada pengelola dan memberikan pengarahan kepada pengelola. Pemerintah Desa juga terus melakukan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan. Rencana kedepan Pemerintah Desa melanjutkan pembangunan seperti pembuatan spot foto, penambahan gazebo-gazebo, pembuatan kolam anak-anak, area bermain anak-anak, pembuatan lahan parkir, pemerintah desa juga menargetkan apabila pembangunan destinasi wisata gunung badut ini sudah mencapai 90% akan mulai membuat retribusi tiket masuk/parkir di area destinasi wisata gunung badut tersebut. Dari segi promosi Pemerintah Desa juga mempromosikan destinasi wisata tersebut melalui media dan apabila area bermain anak-anak sudah selesai dibangun akan mengadakan sosialisasi ke sekolah sekolah guna meningkatkan promosi kepada khalayak umum.

Manfaat dari pembangunan Destinasi wisata gunung badut ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karang. Dalam proses pembangunan dan juga pengelolaan Pemerintah Desa juga memberikan peran penting kepada masyarakat sekitar dari proses pembangunan melibatkan banyak pekerja dari masyarakat sekitar juga dari pengelolaan seperti penjagaan kolam pemaancingan, penjaga warung dan penjaga kebersihan destinasi wisata gunung badut tersebut.

Proses pembangunan Destinasi wisata Gunung Badut ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Sebelumnya masyarakat belum mengetahui akan adanya pembangunan destinasi wisata ini karna masyarakat juga mengetahui untuk membangun destinasi wisata ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar memberikan sosialisasi negosiasi kepada masyarakat sekitar. Pembangunan destinasi wisata gunung badut Desa Karang juga ada kendala seperti pendanaan ke destinasi tersebut hanya terbatas sehingga perlu banyak dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari pemerintah Desa Karang dalam proses pembangunan di destinasi wisata gunung badut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendeskripsikan faktor penghambat dan

pendukung dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi wisata gunung badut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pembangunan ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata yang secara berkelanjutan. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak sosial pengembangan pariwisata dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan tersebut serta membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat lokal. Melalui observasi langsung, peneliti menemukan sejumlah temuan menarik yang mendorong minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Karang dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata Gunung Badut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas peneliti berfokus pada :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pembangunan Destinasi wisata gunung badut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi wisata gunung badut ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan dari Pemerintah Desa Karang dalam proses pembangunan di destinasi wisata gunung badut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi wisata gunung badut

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata dan studi pembangunan. Secara khusus, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur terkait dengan:

- a. Memberikan pemahaman baru tentang implementasi kebijakan pembangunan destinasi wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, SDM, keterlibatan masyarakat lokal, dan peran pemerintah Desa.
- b. Pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam mengelola kawasan Desa wisata, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat langsung kepada berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata Gunung Badut, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Badegan, khususnya di Desa Karang, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat setempat tentang peran dan keterlibatan mereka dalam pembangunan wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan wisata berbasis masyarakat.
- c. Studi ini bisa menjadi referensi bagi pengelola wisata, investor, dan pelaku industri pariwisata lain dalam memahami potensi, tantangan, dan strategi pengembangan Gunung Badut sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pembangunan destinasi wisata Gunung Badut dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

1.5 Penegasan Istilah

1. Pembangunan

Pandangan pembangunan menurut (Y. Hariyanto, 2021), menyatakan bahwa pembangunan adalah peralihan dari suatu negara ke keadaan yang

dianggap lebih baik. Pembangunan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan terhadap masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih manusiawi atau lebih baik. (Rukayat, 2019).

Banyak ahli memberikan definisi berbeda untuk pembangunan, tetapi pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses menuju perubahan. Beberapa ahli mendefinisikan pembangunan sebagai upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembangunan Negara (Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., 2019),.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara keseluruhan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan pembangunan yang lebih baik, masyarakat harus lebih terdidik dan memiliki moral yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif, penting bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah negara mereka sendiri. Ini penting karena kita tidak akan mengulangi kesalahan negara lain dalam menerapkan dan mempertahankan pembangunan. Selain itu, pembangunan harus adil terhadap alam, yang harus dilindungi, dan adil terhadap manusia. Kondisi manusia dan alam juga harus lebih baik karena tujuan pembangunan adalah perbaikan berkelanjutan. (Yuliana NgonganoDeiby Ch. Tinggogoy, 2017).

Dalam proses pembangunan suatu negara, pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan menuju modernitas (Akib & Tepare, 2017). Pendapat lain dikemukakan oleh (Samada et al., 2018) bahwa Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup berbagai tanggung jawab untuk mencapainya, serta perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu mempertahankan program baik atas inisiatif daerah maupun pemerintah didefinisikan sebagai partisipasi. Ini tercermin dalam pemikiran, sikap, dan tindakan mereka berdasarkan model

kerangka partisipasi yang dikembangkan selama tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengambilan manfaat program di lingkungan lokal mereka. (Y. Hariyanto, 2021).

2. Pembangunan Wisata

Di bidang pariwisata, konsep pembangunan berkelanjutan dikenal sebagai "pembangunan pariwisata berkelanjutan". Konsep ini berarti bahwa pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan kebutuhan wisatawan dan keterlibatan masyarakat lokal secara langsung, sambil menekankan perlindungan dan pengelolaan jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya harus difokuskan untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka dapat menjaga integritas dan keberlanjutan ekologi, keanekaragaman hayati, budaya, dan sistem kehidupan pada saat yang sama. (Ratna et al., 2021) Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan empat prinsip, sebagai berikut :

- a. Layak secara Ekonomi (*Economically Feasible*)
- b. Berwawasan lingkungan (*Environmentally Feasible*)
- c. Dapat diterima secara sosial (*Socially Acceptable*)
- d. Dapat diterapkan secara teknologi (*Technologically Appropriate*).

Prinsip Layak Secara Ekonomi menekankan bahwa proses pembangunan harus dilaksanakan secara efisien dan layak secara ekonomi agar dapat memberikan manfaat ekonomi, yang berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pembangunan daerah. Asas Layak Lingkungan menekankan bahwa proses pembangunan harus responsif dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup (alam dan budaya), minimal menghindari dampak buruk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengganggu keseimbangan ekologi. Prinsip Dapat Diterima Secara Sosial menekankan bahwa proses pembangunan harus dapat diterima secara sosial, di mana upaya pembangunan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, dan dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan tersebut. Asas Teknologi Tepat Guna menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterapkan secara teknis, efisien, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Selain itu, proses

tersebut dapat dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. (Rizki Nurul Nugraha, Liliana, Dewi, Nindyning Purnama, 2021)

Secara umum, tiga sasaran utama dapat dimasukkan ke dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan:

1. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), di mana pengembangan pariwisata harus memastikan bahwa sumber daya alam dan budaya yang ada tetap utuh, dan mempertimbangkan daya dukung kawasan, apakah masih mampu menerima atau mendukung pengembangan pariwisata.
 2. Kualitas hidup masyarakat lokal (sosial ekonomi), di mana pengembangan pariwisata harus mampu membedakan masyarakat lokal dari sumber daya alam dan budaya yang ada.
 3. Kualitas pengalaman wisatawan (wisatawan), di mana pengembangan pariwisata harus memperhatikan tingkat kepuasan wisatawan agar perjalanan tersebut berharga. Kualitas produk pariwisata dan interpretasinya sangat penting untuk kualitas pengalaman perjalanan seseorang.
3. Wisata
- Wisata adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat atau destinasi dengan tujuan untuk bersenang-senang, berlibur, berpetualang, atau mengalami hal-hal baru. Wisata bisa mencakup berbagai aktivitas, mulai dari mengunjungi tempat-tempat wisata alam, sejarah, budaya, hingga tempat-tempat rekreasi dan hiburan. Tujuan utama dari wisata adalah untuk mengalami pengalaman baru, melepas penat, dan mendapatkan kenangan yang berkesan.
4. Destinasi
- Destinasi merujuk pada tempat atau lokasi yang menjadi tujuan perjalanan, baik itu wisata, bisnis, atau tujuan lainnya. Destinasi dapat berupa kota, negara, area geografis tertentu, atau bahkan objek tertentu seperti taman nasional, situs sejarah, atau tempat wisata populer lainnya. Destinasi seringkali memiliki daya tarik tertentu yang membuat orang ingin mengunjunginya. Daya tarik ini bisa berasal dari keindahan alam, warisan

budaya, atraksi wisata, atau aktivitas yang dapat dilakukan di destinasi tersebut.

Pengembangan dan promosi destinasi menjadi penting dalam industri pariwisata, karena destinasi yang menarik dapat mengundang wisatawan untuk mengunjunginya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat lainnya bagi komunitas setempat. Destinasi juga dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan tren wisata, perkembangan infrastruktur, perubahan iklim, atau perubahan politik. Oleh karena itu, manajemen destinasi menjadi kunci untuk memastikan destinasi tetap menarik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurut (Helpiastuti, 2018) menyatakan bahwa Kawasan wisata (destinasi) merupakan suatu tempat yang tidak saja menyediakan segala sesuatu yang dapat dilihat wisatawan, namun juga menawarkan aktivitas yang dapat dilakukan pada tempat tersebut dan menjadi daya tarik yang memikat orang untuk berkunjung ke tempat tersebut.

5. Destinasi wisata

Destinasi wisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative, yang didalamnya terdapat daya tarik wisata. Terdapat fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. (Undang-undang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009) Menurut (O. I. B. Hariyanto, 2016) Setiap wilayah memiliki daya tarik yang berbeda, bergantung dari kondisi alam geografis daerah, latar belakang sejarah dan Perkembangan serta kepercayaan yang dianut Masyarakat tersebut. Destinasi wisata merupakan sebuah konsep yang luas dan dinamis, sehingga perlu ditegaskan beberapa istilah penting untuk memahami maknanya secara lebih mendalam.

6. Kesejahteraan

kesejahteraan adalah ketika orang merasa sejahtera. Namun, dengan mengatakan "kehidupan sejahtera" atau "masyarakat", kita akan mendekatkan pengertian tersebut dengan perasaan orang yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera adalah hasil dari terbebasnya dari ketakutan, tekanan, kemiskinan, dan berbagai kekuatan. Rasa sejahtera akan lebih terasa

ketika masyarakat memiliki cukup barang, jasa, dan peluang. Pemerintah Republik Indonesia mengartikan kesejahteraan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya (Fadul, 2019).

kesejahteraan adalah keadaan di mana individu atau kelompok harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) dalam hidup. Pada hakikatnya, kesejahteraan memerlukan terpenuhinya kebutuhan manusia, yang terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer termasuk makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan sekunder terdiri dari ketersediaan sarana transportasi (sepeda, mobil, motor, dan sebagainya), informasi, dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, handphone, internet, dan sebagainya). Kebutuhan tersier terdiri dari ketersediaan sarana rekreasi dan hiburan. Kesejahteraan yang diciptakan juga bersifat material seperti kategori kebutuhan di atas. (Fadul, 2019).

1.6 LANDASAN TEORI

Teori ini mempertimbangkan implementasi kebijakan efektif dapat meningkatkan pembangunan destinasi wisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerangka kerja ini, Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah direncanakan dengan cermat dan rinci. Istilah "implementasi" juga dapat diartikan secara sederhana sebagai "pelaksanaan" atau "penerapan". Browne & Wildavsky, dalam (Misdrum & Abidin, 2018) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Ashiddiq, 2022) mengatakan bahwa Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh orang,

pejabat, pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Sebenarnya, kata "implementasi" mengacu pada tindakan, aktivitas, atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu sistem. Mekanisme berarti pelaksanaan adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan bantuan norma atau acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk mewujudkan suatu program dan melihat hasilnya, tindakan yang disebut implementasi dilakukan Agustino, (2006). Menurut buku *Basics of Public Policy*, implementasi adalah suatu proses yang selalu berubah di mana pelaksanaan kebijakan melakukan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. standar itu sendiri.

Mazmanian & Sabatier, (1983) dalam bukunya *Implementation and Publik Policy* mendefenisikan kebijakan sebagai *"Implementasi keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun juga dapat dalam bentuk perintah eksekutif penting, keputusan atau keputusan badan peradilan. Keputusan biasanya mencakup menentukan masalah yang perlu diselesaikan, mengungkapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan berbagai metode untuk mengatur atau menyusun proses implementasi."*

Chief J. O. Udoji dalam Wardana et al., (2021) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan lebih penting daripada membuat 21 kebijakan. Kebijakan hanyalah rencana atau impian bagus yang tidak akan terwujud jika tidak diterapkan. Menurut pemahaman ini, implementasi kebijakan memerlukan tiga hal: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya kegiatan atau kegiatan untuk mencapai tujuan, dan adanya hasil.

2. Kebijakan

Menurut Carl Friedrich dalam (Yosua T. Panggulu, 2013) Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkungan tertentu dengan hambatan tertentu sambil mencari cara untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Teori ini mempertimbangkan bagaimana regulasi yang kuat dan governance yang efektif dapat meningkatkan pembangunan destinasi

wisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerangka kerja ini, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Nugroho, (2023) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara suatu kebijakan mencapai tujuannya, menambahkan bahwa tidak ada yang lebih atau kurang, dan bahwa implementasi melibatkan tindakan sesuai dengan arah yang diprogramkan. Meter dan Horn dalam Subarsono, (2012) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar kebijakan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik organisasi pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan

elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Ada banyak teori tentang implementasi kebijakan publik, jadi kita harus memilih yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kita harus hati-hati memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan kita, tetapi satu hal yang penting adalah implementasi kebijakan harus menunjukkan bahwa kebijakan itu sendiri efektif.

3. Kesejahteraan

Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory) oleh John Rawls (1971) berfokus pada keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang adil dalam masyarakat. Rawls mengembangkan prinsip "*justice as fairness*", yang menekankan bahwa sistem sosial dan ekonomi harus menguntungkan semua orang, terutama kelompok yang paling kurang beruntung.

Indikator Teori Kesejahteraan Sosial (John Rawls):

1. Ketimpangan Sosial & Ekonomi

Diukur dengan Koefisien Gini untuk melihat tingkat kesenjangan ekonomi dalam suatu negara. Perbedaan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

2. Distribusi Pendapatan yang Adil

Apakah kebijakan ekonomi dan pajak memberikan kesejahteraan bagi kelompok miskin. Rasio antara pendapatan 10% terkaya dengan 10% termiskin.

3. Akses terhadap Pendidikan & Layanan Kesehatan

Tingkat partisipasi pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ketersediaan layanan kesehatan yang merata tanpa diskriminasi ekonomi atau sosial.

4. Kesempatan yang Setara (Equal Opportunity)

Apakah individu dari semua latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Indikator mobilitas sosial: apakah seseorang dari keluarga miskin bisa meningkatkan taraf hidupnya?

5. Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan

Ketersediaan program bantuan sosial bagi kelompok miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan pengangguran. Persentase masyarakat yang menerima bantuan sosial atau jaminan kesehatan dari pemerintah.

6. Kebebasan Individu yang Setara

Apakah setiap warga negara memiliki kebebasan yang sama dalam hal politik, ekonomi, dan social. Indikator hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan memilih pemimpin.

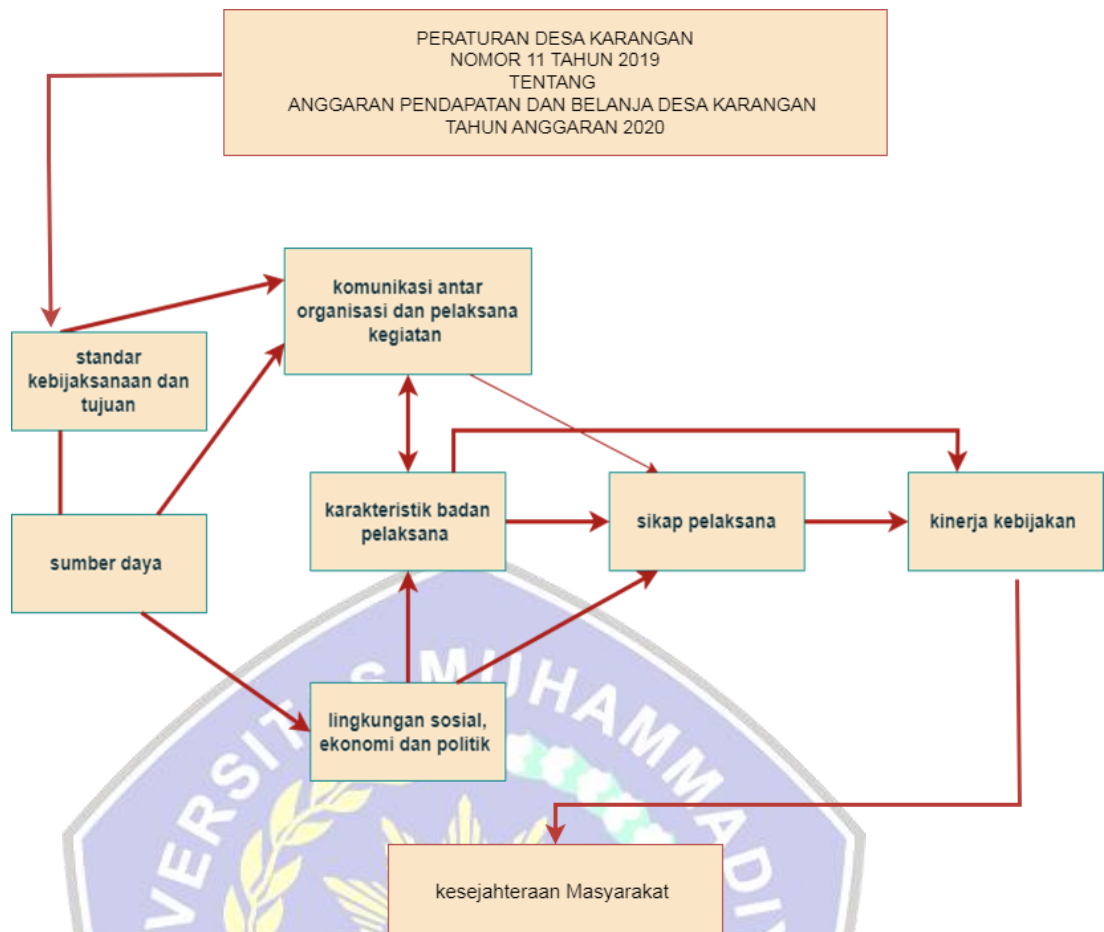
7. Kualitas Hidup & Indeks Kesejahteraan

Indeks Kebahagiaan (World Happiness Index) untuk mengukur kesejahteraan subjektif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

John Rawls menekankan bahwa kebijakan publik harus dibuat dengan mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kelompok yang paling kurang beruntung (*Difference Principle*). Jika kebijakan memperbesar ketimpangan tanpa meningkatkan kesejahteraan mereka, maka kebijakan tersebut dianggap tidak adil.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Van Meter dan Carl E. Van Horn, Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penerapan keputusan atau rencana kebijakan publik ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan mencakup serangkaian kegiatan dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dengan efektif. Berikut ini adalah indikator utama dalam definisi operasional implementasi kebijakan :



Gambar 1. 1 Tabel Devinisi operasional berdasarkan indikator

1) Tujuan dan Standar Kebijakan

Tujuan kebijakan harus jelas, realistis, dan dapat diukur. Standar ini menjadi pedoman bagi pelaksana untuk memahami apa yang harus dicapai. Kejelasan tujuan memengaruhi persepsi pelaksana (indikator **karakteristik organisasi pelaksana**) dan mendorong dukungan dari aktor lain yang terlibat (**komunikasi antarorganisasi**).

2) Sumber Daya

Sumber daya mencakup dana, tenaga kerja, waktu, informasi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang cukup memungkinkan organisasi pelaksana menjalankan tugasnya sesuai tujuan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menimbulkan konflik dengan indikator lain seperti **dukungan eksternal** dan **lingkungan politik dan sosial-ekonomi**, **komunikasi antar organisasi** dengan indikator ini sikapnya sejajar sama dengan standar kebijaksanaan dan tujuan.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi. Kemampuan organisasi pelaksana memengaruhi bagaimana mereka merespons perubahan dalam **lingkungan politik dan sosial-ekonomi**, serta berinteraksi dengan aktor lain melalui **komunikasi antarorganisasi**.

4) Komunikasi Antar organisasi

Interaksi dan koordinasi yang baik antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk menyinkronkan tindakan dan menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik memastikan informasi tentang **tujuan kebijakan** tersampaikan dengan jelas, yang juga membantu mengelola konflik yang mungkin muncul dari perubahan **lingkungan eksternal**.

5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal, termasuk dukungan masyarakat, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi, memengaruhi bagaimana kebijakan diterima dan dilaksanakan. Dukungan sosial-politik memengaruhi kemampuan organisasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan, sementara kondisi ekonomi dapat membatasi atau memperluas ketersediaan **sumber daya**.

6) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap, motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap tujuan kebijakan menentukan sejauh mana kebijakan diterapkan secara efektif. Sikap positif dari pelaksana seringkali dipengaruhi oleh **tujuan kebijakan** yang jelas, **komunikasi antarorganisasi** yang baik, serta dukungan dalam bentuk **sumber daya** yang memadai.

Implementasi kebijakan dapat beragam tergantung pada teori yang digunakan. Secara umum, implementasi kebijakan mencakup proses penerapan keputusan kebijakan oleh berbagai aktor melalui mekanisme koordinasi dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh dengan merujuk pada literatur kunci dalam bidang ini.

Dalam konteks Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*) oleh John Rawls, kesejahteraan sosial dioperasionalkan berdasarkan keadilan distributif, akses yang setara, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Table 1 1 Tabel Definisi Operasional dari Kesejahteraan sosial

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Kualitatif	Metode Pengukuran
Ketimpangan Sosial & Ekonomi	Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi.	1. Persepsi masyarakat terhadap kesenjangan ekonomi 2. Testimoni kelompok miskin tentang akses ekonomi	Wawancara Mendalam, FGD
Distribusi Pendapatan yang Adil	Sejauh mana individu merasa memperoleh pendapatan yang layak.	1. Pengalaman pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup 2. Persepsi pekerja tentang keadilan upah	Observasi, Studi Kasus
Akses terhadap Pendidikan & Kesehatan	Seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.	1. Cerita masyarakat tentang kendala mendapatkan layanan kesehatan 2. Testimoni orang tua tentang akses pendidikan anak	Studi Etnografi, Wawancara Kualitatif
Kesempatan yang Setara (<i>Equal Opportunity</i>)	Pengalaman individu dalam memperoleh kesempatan sosial dan ekonomi.	1. Cerita dari kelompok marginal tentang hambatan sosial 2. Persepsi perempuan atau minoritas terhadap diskriminasi	FGD, Narasi Hidup (<i>Life History</i>)
Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan	Sejauh mana bantuan sosial membantu kehidupan masyarakat rentan.	1. Pengalaman penerima bantuan sosial (misalnya BPJS, PKH) 2. Persepsi tentang efektivitas program jaminan sosial	Wawancara Partisipatif, Observasi
Kebebasan Individu yang Setara	Seberapa bebas individu dalam menyuarakan	1. Testimoni masyarakat tentang kebebasan berbicara dan politik	Studi Dokumen

	pendapat dan haknya.	2. Persepsi kelompok minoritas tentang kebebasan beragama dan berekspresi	
Kualitas Hidup & Indeks Kesejahteraan	Persepsi individu tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup mereka.	1. Narasi individu tentang makna kesejahteraan 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Observasi Partisipatif, Studi Fenomenologi

1.8 METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi fokus penelitian, pemahaman ini tidak terbentuk sebelumnya. Pemahaman umum dan abstrak tentang situasi yang diteliti adalah kesimpulan dari analisis. (Dwiyanto, 2021).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu berada di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Lokasi ini karena ingin mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan dari Pemerintah Desa dalam pembangunan destinasi wisata gunung badut Desa Karangan. Dengan adanya proses pembangunan secara berkelanjutan di destinasi tersebut.

3. Sumber Data

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik ***Purposive sampling*** adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih unit-unit tertentu dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi paling relevan atau mendalam untuk tujuan penelitian. Dalam konteks sumber data yang menggunakan *purposive sampling*, sumber data didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau objek yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 2 Data Informan Beserta alasan

No	Informan	Alasan
1	Kepala desa	Kebijakan pembangunan Gunung Badut berawal dari kepala Desa
2	Sekretaris desa	Pencarian data seperti RPJM dll
3	Kepala Dusun Dilem	Sebagai Pengelola destinasi wisata Gunung Badut
4	3 Masyarakat	Mempunyai peran aktif di wisata gunung badut Desa Karang
5	Pokdarwis	Sebagai pengembangan destinasi wisata

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data biasanya dikategorikan menjadi dua kategori: interaktif atau noninteraktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interaktif berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan secara non-formal terstruktur dengan pertanyaan yang memberikan lebih banyak informasi. Untuk mendapatkan data yang rinci, jujur, dan mendalam, wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap paling sesuai.

b. Observasi

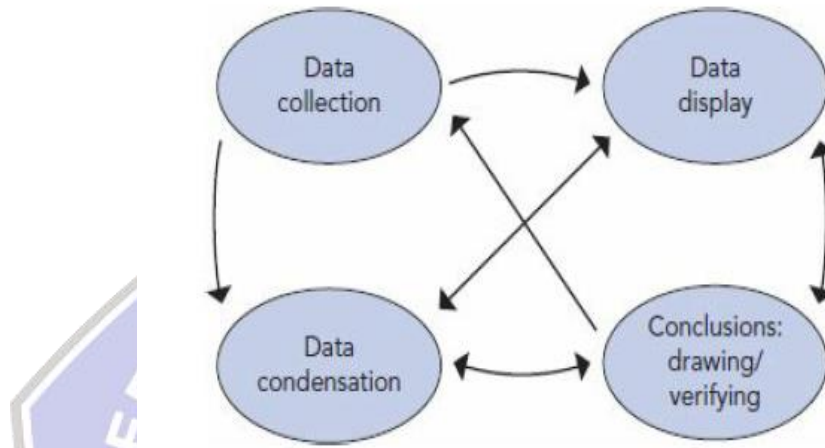
Data diambil menggunakan teknik observasi dari sumber data seperti peristiwa, tempat atau lokasi, dan objek. Dalam observasi, peran ini dilakukan dengan melihat langsung kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini mengamati secara langsung proses pengembangan destinasi wisata dan kehidupan masyarakat di Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari yang tertulis sederhana hingga yang lebih lengkap, dan kadang-kadang mereka bahkan dapat berbentuk benda lain. Penelitian ini mengumpulkan data dengan meninjau literatur atau dokumen serta foto dokumentasi yang relevan.

4. Teknik analisis data

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (Utami & Hayati, 2024). Menurut Miles dan Humberman terhadap analisis data sebagai berikut :



Gambar 1. 2 alur alur analisis data

Sumber (Miles et al., 2014)

b. Pengumpulan data

Pengumpulan dan pengukuran informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan akurat tentang masalah tertentu dikenal sebagai pengumpulan data (Pakpahan et al., 2021).

c. Reduksi Data

Selama proyek berorientasi penelitian kualitatif, reduksi data terjadi secara konsisten. Ini adalah proses yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan (Pakpahan et al., 2021).

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi dan ditarik. Peneliti tidak perlu menafsirkan data yang direduksi sebagai kuantifikasi. Seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat,

mengelompokkan data ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya adalah beberapa cara untuk menyederhanakan dan mengubah data kualitatif. Namun, mengubah data menjadi angka atau peringkat tidak selalu bijaksana.

d. Penyajian Data

Miles & Huberman, (1984) membatasi penyajian pada kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan dianggap sebagai alat penting untuk analisis kualitatif yang valid. Semuanya dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan data terstruktur dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses. Dengan cara ini, seorang analis dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau tetap melakukan analisis sesuai dengan rekomendasi presentasi yang mungkin berguna.

e. Menarik kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan yang menarik hanyalah sebagian dari satu kegiatan dalam konfigurasi yang tetap. Selama penelitian, temuan juga diverifikasi. Kebenaran, kekokohan, dan kesesuaian atau validitas harus diuji pada makna yang diperoleh dari data lain. Untuk menjadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, kesimpulan akhir harus diverifikasi, bukan hanya terjadi selama proses pengumpulan data. Secara skematis proses analisis datanya.

5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ini digunakan untuk memberikan dasar yang kuat dalam analisis dan interpretasi hasil dari penelitian dengan penerapan prosedur yang ketat dan metodologi yang terstruktur, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moelong (2017), Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain selain data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan. Pengecekan melalui sumber lain adalah metode yang paling umum digunakan untuk triangulasi.

Denzin dalam Moelong (2017) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori, yang memiliki beberapa macam diantaranya :

1. Triangulasi sumber (data) triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi metode, triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi penyelidikan, triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali terkait derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi Teori, Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding (Hakim, 2021).

